

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem manajemen pendidikan yang sentralistis tidak membawa kemajuan yang berarti bagi peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Dalam kasus-kasus tertentu, manajemen sentralistis telah menyebabkan terjadinya pemandulan kreativitas pada satuan pendidikan dan berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Untuk mengatasi terjadinya stagnasi dibidang pendidikan ini diperlukan adanya paradigma baru dibidang pendidikan.

Seiring bergulirnya era otonomi daerah, terbukalah peluang untuk melakukan reorientasi paradigma pendidikan menuju kearah desentralisasi pengelolaan pendidikan. Peluang tersebut semakin tampak nyata setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi pendidikan melalui strategi pemberlakuan manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS bukan sekedar mengubah pendekatan pengelolaan sekolah dari yang sentralistis ke desentralistis, tetapi lebih dari itu melalui MBS maka akan muncul kemandirian sekolah.

MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa dalam mengelola sumber daya dengan mengalokasikan sesuai dengan

prioritas kebutuhannya.

Hal ini dipertegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51, ayat (1) bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.¹ Penjelasan pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan.

Pada sistem MBS sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan sumber dayanya dibantu oleh komite sekolah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sekolah serta dituntut untuk mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber dayanya kepada masyarakat, pemerintah maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sekolah.

Dunia pendidikan dituntut untuk dapat menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam hal ini relevansi ditunjukkan pada keberhasilan sekolah dalam mengelola pendidikan, dengan bekerja sama dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui lulusan yang memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Dalam

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51, ayat (1)

rangka meningkatkan relevansi antara pendidikan, pembangunan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan *link and match*. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan keadaan agar lulusan pendidikan sepadan dengan kebutuhan berbagai sektor pembangunan akan tenaga ahli dan terampil sesuai dengan jumlah, mutu dan sebarannya.²

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik dalam hal pengembangan kemampuannya terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sejalan dengan Peraturan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 3 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.³ Pendidikan kejuruan memiliki peran untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja secara mandiri (wirausaha) maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu institusi yang dituntut untuk mampu menghasilkan tenaga terampil yang terdidik atau lulusan yang sebagaimana diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga yang terampil sebagai

² Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.10

³ *Peraturan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*

sumberdaya yang berkompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya serta memiliki daya saing yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut siswa dituntut untuk lebih mengembangkan dirinya agar dapat mengimbangi pendidikan yang dipilihnya agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan tempat pendidikan. Sekolah pun juga dituntut untuk meningkatkan relevansi dan mutu layanan. Untuk itu, salah satu cara menjawab tuntutan tersebut adalah dengan melaksanakan kemitraan.

Sebagaimana tertulis dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan yang menyatakan bahwa setiap sekolah harus menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan *input*, proses, *output* dan pemanfaatan lulusan.⁴

Kemitraan sangat perlu diperhatikan karena sebagian besar sekolah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum memiliki akses yang luas dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI). Lemahnya *link* dengan Dunia Usaha/Dunia Industri menyebabkan kesenjangan kompetensi yang semakin lebar antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga banyak lulusan sekolah yang tidak terserap ke dunia kerja.

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia meningkat 300 ribu orang selama

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan

setahun dari Februari 2014 sampai Februari 2015. Dari data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi penduduk berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMK) sebesar 9,05 persen, lalu disusul pada jenjang Sekolah Menengah Atas 8,17 persen, dan Diploma I/II/III sebesar 7,49 persen. Sedangkan TPT terendah ada pada penduduk berpendidikan SD ke bawah dengan prosentase 3,61 persen di periode Februari 2015. Selama setahun terakhir TPT yang mengalami peningkatan yakni penduduk dengan pendidikan SMK 1,84 poin, Diploma I/II dan III sebesar 1,62 poin dan Universitas 1,03 poin.⁵

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia yang paling tinggi terjadi pada penduduk dengan jenjang pendidikan tertinggi SMK. Lulusan SMK seharusnya langsung dapat kerja karena memiliki keahlian sesuai dengan kompetensi keahlian. Salah satu penyebab daya serap rendah ini adalah belum ada *link and match* antara kompetensi lulusan SMK dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan dunia industri.

Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F Abdurrahman mengatakan terjadi ketidaksinergian antara keahlian lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan permintaan industri. "Pengangguran terjadi bukan karena keterbatasan lapangan kerja, tetapi karena ketidaksinergian antara lulusan dan permintaan industri,"⁶ Kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara

⁵ Fiki Ariyanti, *7,45 Juta Penduduk RI Menganggur, Terbanyak Lulusan SMK* (<http://bisnis.liputan6.com/read/2226109/745-juta-penduduk-ri-menganggur-terbanyak-lulusan-smk>), diakses pada tanggal 5 Januari 2016 pukul 23.05 WIB

⁶ *BNSP: Terjadi Ketidaksinergian Antara SMK dan Industri* (<http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=81065>), diakses pada tanggal 16 April 2016 pukul 14.34 WIB

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sekolah dengan dunia industri.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar SMK memiliki peralatan praktik yang jauh tertinggal dibandingkan dengan peralatan dan teknologi yang diterapkan dunia industri sehingga ilmu yang dipelajari oleh siswa SMK tidak sinkron dengan tuntutan dunia kerja. Selain itu, tidak sedikit satuan pendidikan yang belum mampu menyusun program kemitraan maupun memahami prosedur menjalin kemitraan dengan lembaga lain, serta mewujudkannya dalam bentuk naskah kerjasama dan kemitraan⁷

Dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, SMK Negeri 1 Kota Bekasi menjalin kemitraan dengan beberapa pihak di luar sekolah. hal ini dilakukan dalam rangka mencapai visi sekolah. Kemitraan ditumbuhkembangkan untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dan dalam upaya meningkatkan mutu layanan, karena dengan adanya kemitraan memungkinkan terjadinya sinergi untuk mencapai tujuan bersama.

SMKN 1 Kota Bekasi merupakan sekolah yang ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan SMK (PSMK) sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional untuk seluruh kompetensi keahlian sejak tahun 2008.

⁷ Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan PSDMPK dan PMP, *Kemitraan Sekolah Dengan Pihak Eksternal*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), h.6

Sesuai dengan surat keputusan Walikota Bekasi Nomor 420/Kep.169.A-Disdik/IV/2013 tentang penetapan kategori sekolah SMK, SMA dan SMK Negeri Kota Bekasi maka SMK Negeri 1 Kota Bekasi masuk dalam kategori Sekolah Model. Saat ini SMK Negeri 1 Kota Bekasi sudah menjadi sekolah model bagi SMK lainnya yang ada di kota Bekasi. Sekolah model adalah sekolah berstandar SKM (Sekolah Kategori Mandiri) yang telah mampu mengintegrasikan penerapan 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan), PBKL (Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal) dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.

SMK Negeri 1 Kota Bekasi memiliki visi “Sekolah Model yang menghasilkan SDM yang mampu bersaing di era global dengan dilandasi akhlak mulia”. Dengan visi tersebut diharapkan SMK Negeri 1 Bekasi menjadi lembaga yang menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkarakter, cerdas, kompeten, mampu berwirausaha serta bersaing di era global dengan dilandasi akhlak mulia.

Berdasarkan hasil grandtour yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2016, peneliti mendapatkan informasi bahwa SMK Negeri 1 Kota Bekasi memiliki bidang tersendiri yang mengurus persoalan mengenai hubungan kemitraan yaitu Bidang Hubungan Industri. Hubungan Industri sendiri, terbagi menjadi 2 (dua) unit kerja yaitu unit BKK (Bursa Kerja Khusus) dan unit Prakerin (PSG). Dimana unit BKK di SMK Negeri 1 Kota Bekasi

ini merupakan program sekolah yang dibentuk dalam rangka menjembatani antara sekolah dengan DU/DI dalam membantu penyerapan lulusan ke dunia kerja. Sedangkan unit prakerin (PSG) di SMK Negeri 1 Kota Bekasi merupakan program sekolah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan pendidikan sistem ganda bagi siswa baik di sekolah maupun di lapangan (Prakerin). Sampai saat ini sebanyak 125 perusahaan yang menjadi mitra sekolah ini, baik perusahaan besar maupun menengah, baik perusahaan di dalam maupun di luar negeri. Tercatat sebanyak 52 perusahaan sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak SMK Negeri 1 Bekasi, yang bekerja sama dalam aspek pengembangan kurikulum, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, program prakerin (PSG), rekrutmen, pengadaan alat dan bahan praktik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Kemitraan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri 1 Kota Bekasi*".

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah Kemitraan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Adapun sub fokus penelitian mencakup pemetaan dan peninjauan kemitraan, pelaksanaan kemitraan, dan monitoring dan evaluasi kemitraan.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan sub fokus penelitian, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemetaan dan peninjauan kemitraan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Kota Bekasi?
- b. Bagaimana pelaksanaan kemitraan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Kota Bekasi?
- c. Bagaimana monitoring dan evaluasi kemitraan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Kota Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengetahui kemitraan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Kota Bekasi.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menjadi referensi pembelajaran ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya dalam mekanisme atau langkah-langkah kemitraan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk peneliti lain dalam bidang Manajemen Pendidikan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan sebagai wahana untuk melatih keterampilan menulis karya ilmiah serta sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.
- b. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan perlunya melaksanakan kemitraan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah guna meningkatkan mutu layanan sekolah dan relevansi program.
- c. Bagi Kepala SMK Negeri 1 Kota Bekasi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran terkait pelaksanaan kemitraan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, sehingga dapat dijadikan referensi bagi sekolah.